

BAB V

PENUTUP

Demokrasi dinilai sebagai suatu bentuk pemerintahan yang paling baik di antara yang buruk. Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem pemerintahan demokrasi tidaklah baik seluruhnya, terdapat kelemahan di dalamnya. Dalam keadaannya yang demikian, demokrasi tetaplah diterapkan di banyak negara dewasa ini. Karl Popper dalam pemikiran filosofisnya juga menyarankan penerapan sistem demokrasi, karena baginya sistem demokrasilah yang akan menciptakan pemerintahan yang anti terhadap kekerasan. Dalam sistem demokrasi juga memungkinkan terjadi pengontrolan dari masyarakat bagi pihak yang berkuasa.

Masyarakat terbuka sebagaimana yang ditawarkan oleh Popper dalam filsafat politiknya memberikan ruang bagi kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Hal ini dilandasi oleh realitas sosial politik pada masanya yang mengekang kebebasan untuk memberikan kritik kepada rezim yang berkuasa, secara khusus sang diktator Hitler. Landasan lain bagi konsep masyarakat terbuka yang ditawarkan oleh Popper ialah prinsip falsifikasi, sebagaimana yang diterapkannya dalam bidang ilmu pengetahuan.

Realitas demokrasi yang cenderung mengalami ketimpangan, pemikiran Popper perihal masyarakat terbuka dinilai sebagai sarana yang tepat untuk memperbaikinya. Indonesia yang sistem demokrasinya tengah mengalami ketimpangan perlu juga untuk dikritisi dari sudut pandang masyarakat terbuka yang ditawarkan oleh Popper.

5.1. Kesimpulan

Konsep yang ditawarkan oleh Popper dalam bidang politik ialah masyarakat terbuka. Konsep ini lahir dari suatu bentuk penolakan yang dilakukan oleh Popper terhadap sistem pemerintahan yang timpang pada masanya, serta sebagai suatu bentuk penerapan sistem pemikirannya dalam bidang ilmu pengetahuan ke dalam bidang politik. Situasi politik yang dialami oleh Popper didominasi oleh praktik kekerasan yang bersifat totaliter di bawah rezim Nazi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Popper menawarkan prinsip falsifikasi yang menekankan peranan dari kritik serta menolak adanya kebenaran mutlak. Prinsip inilah yang menjadi landasan epistemologi dalam masyarakat terbuka.

Dalam masyarakat terbuka, ditekankan adanya dimensi rasional kritis. Artinya individu diberikan kebebasan untuk memberikan kritik serta terbuka pula untuk menerima kritik. Individu dalam konsep masyarakat terbuka yang ditawarkan oleh Popper mempunyai kesetaraan, sehingga setiap individu berhak untuk menyampaikan kritik serta pendapat. Kritik dalam masyarakat terbuka mempunyai peranan yang signifikan, kritik dinilai sebagai sarana yang dapat mengatasi ketimpangan dalam sistem pemerintah tanpa melalui kekerasan serta pertumpahan darah. Tindakan kekerasan oleh Popper dalam konsep masyarakat terbuka sangat ditolak, sebab kekerasan bukanlah solusi yang tepat untuk menanggulangi ketimpangan politik.

Masyarakat terbuka yang ditawarkan oleh Popper menjadi jawaban atas kesalahan dalam penerapan nilai demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan hingga era reformasi dewasa ini tidaklah berjalan secara optimal. Sejarah telah mencatat terdapat banyak ketimpangan dalam mempraktikkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Era Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto nilai demokrasi di Indonesia mengalami degradasi. Era ini menampilkan sistem yang sebaliknya yakni bentuk

pemerintahan yang totaliter. Ketimpangan juga terjadi dalam era reformasi. Terdapat praktik pembungkaman kebebasan untuk menyampaikan pendapat serta adanya tindakan kekerasan. Pembungkaman terhadap kebebasan untuk menyampaikan pendapat hadir dalam Undang-Undang ITE, sedangkan tindakan kekerasan dalam bentuk praktik hukuman mati.

Konsep masyarakat terbuka yang ditawarkan oleh Popper memberikan solusi bagi permasalahan demokrasi yang melanda Indonesia dalam era reformasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk di dalamnya kritik terhadap ketimpangan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Tindakan kekerasan bukanlah sarana untuk mengurangi ketimpangan, melainkan kritik. Melalui kritik ketimpangan dapat diminimalisir tanpa tindakan represif.

Berkaca dari konsep masyarakat terbuka yang ditawarkan oleh Popper, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum mempraktikkan nilai-nilai demokrasi secara maksimal. Indonesia masih mempraktikkan rezim yang bersifat otoriter dalam menjalankan sistem demokrasinya. Demokrasi Indonesia belum memberikan kesempatan yang bebas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, serta belum maksimal dalam penghargaan atas hak hidup dari setiap individu.

Demokrasi Indonesia perlu untuk memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat sebagaimana yang ditawarkan oleh Popper dalam konsepnya tentang masyarakat terbuka. Melalui kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dalam sistem pemerintahan akan terciptanya pengontrolan yang hadir dalam bentuk kritik. Pengontrolan yang dilakukan melalui kritik, menciptakan suatu bentuk pemerintahan yang kondusif, pemerintahan yang tidak menjalankan kekerasan, serta mengakui hak dari setiap individu. Melalui keterbukaan terhadap kritik, akan terciptanya sistem pemerintahan yang tidak menerapkan praktik

kekerasan. Kritik menjadi sarana yang mampu untuk mengontrol ketimpangan dalam pemerintahan tanpa melalui kekerasan, tanpa adanya pertumpahan darah. Sesama manusia bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Masyarakat terbuka yang ditawarkan oleh Popper juga memberikan sumbangan bagi demokrasi Indonesia untuk kembali meninjau kebijakan yang telah dihasilkan. Setiap kebijakan tidak bersifat dogmatis, sehingga perlu untuk dikritisi dan diperbaharui. Kriteria pembaharuan setiap kebijakan ialah kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perlu untuk diperbaharui apabila tidak menjamin kesejahteraan dari masyarakat.

5.2. Kritik

Popper menyumbangkan suatu pemikiran yang luar biasa dalam bidang politik. Sumbangan yang dimaksudkan ialah konsep tentang masyarakat terbuka. Konsepsi yang memberikan keterbukaan terhadap kritik. Artinya, sebagai masyarakat baik sebagai pemerintah maupun sebagai rakyat perlu adanya keterbukaan terhadap kritik. Pihak yang berkuasa harus mampu untuk menerima kritik yang disampaikan, sedangkan pihak yang diperintah diberikan kebebasan untuk melakukan kritik terhadap pemerintah.

Masyarakat terbuka sebagaimana yang ditawarkan Popper bersesuaian dengan dimensi rasionalitas yang dimiliki manusia. Secara esensial, manusia tidak lain adalah makhluk yang berakal budi. Manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir. Pola pemikiran yang dimiliki oleh manusia juga tidak bersifat tetap, melainkan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan struktur sosial begitu pun sebaliknya. Struktur sosial memberi pengaruh terhadap pola pemikiran serta tatanan sosial dibentuk oleh pemikiran dari manusia.

Pemikiran manusia yang senantiasa mengalami perubahan memiliki kesamaan dengan pemikiran Popper. Baginya setiap kebijakan perlu untuk senantiasa ditinjau dan dikritisi. Popper dalam program politiknya menyarankan suatu perubahan, serta tidak

menerima adanya dogmatisme dalam dunia perpolitikan. Manusia yang adalah makhluk berakal budi menggunakan kapasitas yang dimilikinya itu guna menciptakan tatanan sosial yang kondusif.

Masyarakat terbuka yang ditawarkan oleh Popper juga mempunyai kelemahan. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat terbuka, Popper hanya menekankan peranan kritik untuk mengurangi ketimpangan dalam pemerintahan. Kritik sebagai sarana untuk mengontrol ketimpangan, namun bukan sarana untuk menciptakan kesejahteraan. Dalam program politik yang ditawarkan oleh Popper, sarana untuk menciptakan kesejahteraan tidak ditemukan. Masyarakat terbuka yang ditawarkan oleh Popper belum menjadi sarana yang pasti, sebab ada kemungkinan untuk dikritisi lagi.

Hal lain yang juga perlu untuk diperhatikan mengenai konsep masyarakat terbuka sebagaimana yang ditawarkan oleh Popper perihal keberadaan masyarakat. Keterbukaan terhadap kritik yang ditekankan oleh Popper dalam konsepnya tentang masyarakat terbuka tidak dapat dengan mudah diterapkan pada masyarakat. Dewasa ini tidak semua individu dapat dengan mudah untuk menerima kritik, serta cukup sulit memberikan kritik dan lebih berfokus dalam hal mengurus diri sendiri.

5.3. Saran

Pertama, bagi peneliti. Karl Popper merupakan seorang tokoh filsafat yang memberikan sumbangan pada dua bidang filsafat yakni bidang ilmu pengetahuan dan bidang politik. Hal inilah yang menjadikannya sebagai seorang pemikir dengan cakupan yang luas. Keluasan cakupan pemikiran yang dimilikinya ini memberikan peluang untuk juga melakukan penelitian atas pemikirannya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

Dalam bidang politik penelitian juga dapat diadakan dalam kajian Popper tentang historisisme. Popper menolak prinsip historisisme, sebab baginya historisisme menjadi

pemicu terjadinya pemerintahan yang otoriter. Pemikirannya ini dapat menjadi pula sarana untuk menciptakan bentuk pemerintahan yang lebih kondusif.

Kedua, bagi Civitas Akademika. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberi semangat bagi Civitas Akademika Filsafat Widya Mandira Kupang untuk menekuni pula pemikiran Karl Popper. Popper merupakan pemikir yang mempunyai jangkauan pemikiran yang luas, sehingga layak untuk didalami.